



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2019**

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya jualah kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 dengan baik.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 disusun sebagai acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama kurun waktu perencanaan yaitu 2019 dan sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini. Semoga Allah.SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selatpanjang, Agustus 2018

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti



Drs. ASRORUDIN, M.SI

NIP. 19670204 199503 1 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan.....	2
1.3 Landasan Hukum.....	5
1.4 Sistematika.....	6
BAB II RENCANA STRATEGIS.....	8
2.1 Visi dan Misi.....	8
2.2 Tujuan dan Sasaran	9
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum	12
BAB III HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2017	16
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017	16
3.2 Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2017.....	17
BAB IV RENCANA KINERJA TAHUN 2019.....	19
4.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	19
4.2 Rencana Kinerja Tahun 2019.....	22
BAB V PENUTUP	24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017–2021, serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkedudukan di jalan Terpadu, adalah perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijaksanaan yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk melaksanakan tugas pokok di bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas.
- b) Sekretaris, membawahi:
 1. Sub. Bagian Perencanaan Program
 2. Sub. Bagian Keuangan
 3. Sub. Bagian Administrasi dan Umum
- c) Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 1. seksi rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
 2. seksi jaminan sosial dan keluarga;
 3. seksi perlindungan sosial korban bencana.
- d) Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
 1. seksi identifikasi dan penguatan kapasitas;
 2. seksi pedampingan, bantuan stimulan dan penataan;
 3. seksi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi.

e) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak, terdiri dari:

1. seksi pemberdayaan perempuan;
2. seksi perlindungan perempuan, pengurus utamaan gender (pug);
3. seksi perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan bina ketahanan.

f) Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, terdiri dari:

1. seksi pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
2. seksi keluarga berencana;
3. seksi ketahanan dan pembinaan kesejahteraan keluarga.

g) Unit pelaksana teknis dinas;

h) Kelompok jabatan fungsional.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.4 Sistematika

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika

BAB II Rencana Strategis

- 2.1 Visi dan Misi
- 2.2 Tujuan dan Sasaran
- 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum
- 2.4 Indikator dan target

BAB III Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2017 dan Triwulan 1 Tahun 2018

- 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017
- 3.2 Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2018
- 3.3 Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2017 dan Triwulan 1 Tahun 2018

BAB IV Rencana Kinerja Tahun 2019

- 4.1 Indikator Kinerja Tahun 2019
 - a. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
 - b. Rencana Kinerja Tahun 2019
- 4.2 Rencana Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019

BAB V Penutup

BAB II
RENCANA STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Visi kabupaten Kepulauan Meranti :

“ Menjadikan Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga Yang Maju Dan Unggul Dalam Tatahan Masyarakat Madani.”.

Misi :

- 1. MENINGKATKAN PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KHARIMAH**
- 2. MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT**
- 3. MEWUJUDKAN PENATAAN BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN**
- 4. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN POTENSI KAWASAN NIAGA**
- 5. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN OPTIMALISASI PENATAAN RUANG**
- 6. MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**
- 7. MENDORONG PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAN SENI LOKAL**

2.2. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai , sinerjik dan berkelanjutan.

Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana kinerja tahunan /RKT) sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tujuan yang akan ditempuh dalam lima tahun adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan pemerintah yang baik dengan Indikator Tujuan:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Indikator Tujuan:

a. Angka Kemiskinan

Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 4.1 Tujuan jangka Menengah Dinas SOSP3AP2KB

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi Awal	TARGET KINERJA SASARAN				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Pelayanan Pemerintah yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	70	80	85	90	90
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka kemiskinan	30,89	28,99	27,60	25,05	23,82	20,97

Sasaran yang akan ditempuh dalam lima tahun adalah :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur dengan indikator sasaran:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya penanganan terhadap PMKS dengan indikator sasaran:
 - a. Persentase PMKS yang tertangani
3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dengan indikator sasaran:
 - a. Prevalensi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
 - b. Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial
4. Menurunnya Angka Kelahiran Total
 - a. Angka Kelahiran Total (TFR)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

**Tabel 2.1
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2016-
2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Pelayanan Pemerintah yang baik	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	70	80	85	90	90
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Angka kemiskinan	30,89	28,99	27,60	25,05	23,82	20,97
		Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	N/A	50	55	60	65	70
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	N/A	0.175	0.232	0.289	0.346	0.403
			Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	N/A	53	55	57	59	61
		Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,37	2,36	2,35	2,33	2,31	2,28

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**TABEL 2.2
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2016-2021**

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALTERNATIF STRATEGI
Tujuan I: Meningkatkan pelayanan pemerintah yang baik			
1.1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	1.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Administrasi • Peningkatan Kapasitas dan SDM Aparatur • Peningkatan Disiplin Aparatur • Peningkatan Sarana prasarana Aparatur • Implementasi akuntabilitas kinerja aparatur
Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
2.1	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	2.1.1. Persentase PMKS yang tertangani	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Kelembagaan PSKS • Peningkatan Kualitas SDM PSKS • Pendampingan sarana prasarana PSKS • Pengelolaan TMP • Penyediaan Operasional bagi PSKS
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan fakir miskin dan KAT • Pemberian bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi korban kebakaran

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALTERNATIF STRATEGI
			<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Rehabilitasi bagi PMKS di luar panti • Pelayanan perlindungan dan jaminan Sosial keluarga • Pendampingan Program Keluarga harapan • Pembinaan Anak Terlantar • Pembinaan Penyandang Cacat • Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan dan PMKS Kabupaten
2.3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	2.3. Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) • Pembinaan Forum Anak • Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja • Penyuluhan Bahaya narkoba bagi Perempuan dan Anak • Pembinaan kreatifitas Anak • Peningkatan capaian Kabupaten Layak Anak
		2.4. Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Organisasi wanita • Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu • Pembinaan Kelembagaan PUG • Pembinaan UP2K • Pembinaan Peran Perempuan Menuju keluarga Sehat dan Sejahtera
2.5.	Menurunnya Angka Kelahiran total (TFR)	2.5.1. Angka Kelahiran Total (TFR)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan KB Pria • Penyediaan Sarana Pendataan KB • Penyediaan Sarana Petugas Lapangan KB • Peningkatan Kualitas penyuluhan Keluarga Berencana • Peningkatan pelayanan distribusi ALKON • Peningkatan kelembagaan kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) • Peningkatan Kelembagaan PPKBD dan Sub-PPKBD

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALTERNATIF STRATEGI
			<ul style="list-style-type: none">• Penguatan kelembagaan kenseling (PIK-R)• Penyusunan kebijakan Pengendalian Kependudukan

2.2 indikator Kinerja

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 - 2021

NO	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
		Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	N / A	70	80	85	90	90	90
2	Persentase PMKS yang ditangani	N / A	N / A	50	55	60	65	70
3	Prevalensi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	N / A	N / A	0.175	0.232	0.289	0.346	0.403
4	Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	N / A	N / A	53	55	57	59	61
5	Angka kelahiran Total (TFR)	2,38	2,38	2.36	2.35	2.33	2.31	2.28

BAB III
HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2017

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media Formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator Tahun 2017 diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut :

- 85 s.d 100 = baik sekali
- 70 s.d <85 = baik
- 55 s.d <70 = cukup
- < 55 = kurang

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Pada tahun 2017 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Perjanjian Kinerja melalui 8 (Delapan) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.1:
Evaluasi Pencapaian Sasaran Tahun 2017**

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Satuan	Target 2017			Target S.d 2021
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	%	65%	65%	100%	75 %
2	Persentase PSKS yang berperan aktif	N/A	%	20%	40%	200%	40%
3	Persentase Rumah Tangga Fakir miskin dan KAT yang memiliki rumah layak huni	2	%	3%	3,92%	130,76%	7%
4	Persentase Penurunan Angka PMKS	2	%	4%	5,56%	138%	12%
5	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	60	%	70%	100%	130%	90%
6	Persentase PUG Aktif	N/A	%	20%	0	0%	40%
7	Persentase kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	N/A	%	50%	100%	200%	75%
8	Persentase Forum Anak (Kecamatan, Kelurahan dan Kabupaten) yang terbentuk	1	%	10%	10,48%	104,80%	30%
9	Persentase PUS yang mengikuti KB aktif	54	%	54,5 %	54,57%	100,13%	56,5 %
10	Persentase Institusi Masyarakat Pedesaan / perkotaan (IMP) aktif	15	%	18%	21,11%	117,28%	28%

3.2. Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2017

Pada Tahun 2017, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggambarkan capaian kinerja dalam hal peningkatan kualitas pembangunan manusia Kabupaten Kepulauan Meranti seperti derajat kesehatan masyarakat dan tingkat pendidikan dinilai yang positif.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya tidak mencapai target, yaitu :

1. Peningkatan kinerja Pelayanan Aparatur
2. Peningkatan Pelayanan terhadap PMKS
3. Peningkatan peran aktif PSKS
4. Peningkatan kelembagaan PUG aktif
5. Peningkatan IMP aktif
6. Peningkatan PUS yang mengikuti KB aktif

Rekomendasi tersebut di atas sedapat mungkin dapat direalisasikan pada Tahun 2019 dan tahun 2020 dengan maksud untuk mengakselerasi capaian kinerja sasaran dalam upaya mewujudkan pencapaian visi dan misi dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017 – 2021.

BAB IV
RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikembangkan cara pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Keberhasilan dan kegagalan organisasi melalui pelaksanaan program kegiatan dirancang dengan Rencana Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Rencana Kinerja Tahunan yang akan diperjanjikan.

1.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

TABEL 4.1 :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA	
	SASARAN RENSTRA SKPD			ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN			
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Kepmenpan No. 25 Tahun 2004	Hasil survai indek kepuasan masyarakat berdasarkan kepmenpan no 25 tahun 2004	Dinsos P3AP2KB	Sebagai bahan evaluasi pelayanan dalam meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat.	
2	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 1 Tahun 2017 tentang SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, SPM Permensos 9/ HUK/2018,	Jumlah PMKS yang tertangani	x 100	Dinsos P3AP2KB	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
					Jumlah PMKS yang ada			
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	Permen PPPA No 01 Tahun 2010 dan Permen PPPA No 2 Tahun 2011	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun Lalu + Tahun Ini	x 100	Dinsos P3AP2KB	Mengurangi Kasus kekerasan terhadap perempuan anak sesuai dengan Permen PPPA No 01 Tahun 2010 dan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2011
		Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	%	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam	Jumlah Perempuan Yang menduduki jabatan Manajerial			

				Pembangunan Nasional	Jumlah Pekerja Perempuan (Usia 18 Tahun Ke atas)		
4	Menurunnya angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	angka	RPJMN 2015 - 2019 Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/BI/2015 tentang Renstra BKKBN 2015 - 2019	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i f} \times K$	Dinsos P3AP2KB, BPS, SUSENAS, SDKI, BKKBN	<p>TFR = Angka Kelahiran Total</p> <p>ASFR_i = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur</p> <p>b_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu</p> <p>p_i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama</p> <p>i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49)</p> <p>K = bilangan konstanta biasanya 1000</p>

1.2. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai landasan kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2019. Hal ini mengingat Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Rencana Kinerja Tahun 2019 memuat sasaran, indikator kinerja dan target dan tersusun sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 4.2 :
RENCANA KINERJA TAHUN 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2019	Target Akhir Renstra
Meningkatnya kinerja pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase (%)	85%	90%
Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang ditangani	Persentase (%)	60 %	70%
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase (%)	0.289	0.403
	Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	Persentase (%)	57%	61%
Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2.33	2,28

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019 ini merupakan komitmen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan oleh masing-masing Bidang dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi..

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.